



Washathiyah Al-Iqtishadiyah: Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Sebagai Sarana Mewujudkan Keseimbangan dalam Moderasi Beragama

Mohammad Fauzan^{1*}, Sahran Raden² & Faisal Attamimi³

¹Magister Ahwal Syakhshiyah

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Mohammad Fauzan, E-mail: fauzankabanniy@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

KATA KUNCI

Ekonomi, Pancasila, keseimbangan, moderasi beragama

ABSTRAK

Banyak faktor yang menjadi kemunduran dalam islam, kemunduran ini bukan saja dikarenakan keterbatasan dalam memahami ajaran teks-teks agama saja, tapi islam pun juga harus mengakui kemundurannya terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomiannya. Dahulu para ulama tidak saja menjadikan ibadah sebagai perhatian utamanya, namun juga memposisikan kekuatan ekonomi sebagai bekalnya dalam menjalankan syariat lainnya. Sehingga kesadaran inilah yang perlu kembali dibangun di masyarakat saat ini, karena komoderatan berfikir seseorang juga dapat di pengaruhi dari tingkat perekonomiannya.

Artikel ini disusun untuk menyadarkan kembali keseimbangan ekonomi kita dalam pengaruhnya membangun tingkat kemoderatan masyarakat sekitar. Ekonomi pancasila dengan semangat azas kekeluargaannya dianggap mampu menjadi solusi kembali sebagaimana yang dicita-citakan oleh Moh. Hatta di awal berdirinya negara ini.

adapun artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya (soerjono soekanto,1986).

hal yang perlu dilakukan sebagai sarana mewujudkan moderasi beragama berbasis ekonomi Pancasila yaitu, Mencoba mewujudkan Nilai Nilai ekonomi Pancasila Pada praktek perekonomian di Indonesia dengn memberikan kesadaran baik pada tataran Produsen, Distributor, dan juga Konsumen bahwa ekonomi tidak hanya menyoal permasalahan material individual saja.

ketidak independensian akal dapat dipengaruhi ketidak independensian ekonomi, olehnya dianggap perlu adanya kemandirian secara ekonomi sehingga dalam bertindak dan bertingkah laku tidak berada pada tuntutan ataupun dan juga tidak dipengaruhi apapun kecuali pada kebenaran.

1. Pendahuluan

Dalam wacana dan perkembangan global, ekonomi juga menjadi sorotan utama yang tidak hanya mejadi isu dunia tapi juga menjadi perbincangan hangat di kalangan ummat islam. Isu mengenai ekonomi dan perdagangan barang kali menjadi isu kontemporer yang paling hangat. Bukan hanya karena ia melibatkan prospek-prospek pertumbuhan ekonomi yang berarti kemakmuran masyarakat. Tapi juga melibatkan berbagai aktor kepentingan. (Budi winarno. 2014).

***Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Jika kita menggali Kembali sejarah kenabian maka akan kita dapatkan risalah para nabi yang tidak saja memperjuangkan nilai-nilai peribadatan dan penyembahan kepada tuhan saja, tapi juga mengajarkan kepada para umat untuk mandiri dan bangkit dari jajahan ekonomi yang dirasakan saat itu sehingga para pengikut islam terbebas dari starata social yang menjerumuskan pada rasa mustadhafin atau fuqara yang din jajah oleh mustakbirin, sehingga tidak terjadi keseimbangan dalam urusan dunia dan urusan akhirlatnya karena masih terjajah dalam urusan perekonomiannya.

Hal serupa mengenai perhatian kemandirian ekonomi ini juga terjadi pada masa kaum tabi'in yang tidak saja menjadikan kepentingan akhirlatnya sebagai tujuan utamanya tapi juga menjadikan urusan ekonominya menjadi mandiri sehingga terjadi keseimbangan dan kemoderatan dalam kehidupan. Menurut analisis yang dilakukan oleh ahmad T. Kuru bahwa dari abad ke-8 sampai dengan abad pertengahan abad ke-11 bahwa 7,25 ulama dan keluarganya bekerja dibidang perniagaan dan Perindustrian. (Ahmad Kuru,2022)

Sehingga tidak heran para ulama pun tidak mengesampingkan kehidupan dunianya dibanding dengan kehidupan akhirlatnya, namun dilakukan secara beriringan dan dijalani secara seimbang. Dalam melakukan fatwa, para ulama juga dituntut untuk dapat mandiri secara ekonomi sehingga dalam penetapan fatwanya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemoderatan tanpa berpihak kepada selain kebenaran. Olehnya kemandirian secara ekonomi dianggap perlu dalam menopang nilai-nilai kemoderatan dalam berfikir dan bertindak.

Secara umum sudah banyak tawaran dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi di berbagai negara, termasuk didalamnya adalah ekonomi pancasila yang digaungkan oleh Mubyarto yang memandang ekonomi selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Jika melihat kandungan yang terdapat pada konsep ini, maka akan didapatkan kesamaan dengan ekonomi kerakyatan yang di pelopori oleh bung hatta, dengan tujuan yang sama yaitu membangkitkan kesadaran gotong royong dalam berekonomi dan keseimbangan antar sesama.

Adapun artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya (soerjono soekanto,1986). Dari segi sifatnya maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang integrasi ekonomi pancasila dan moderasi beragama dan juga ekonomi pancasila sebagai sarana dalam mewujudkan moderasi beragama.

2. Pembahasan

2.1. Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dan Moderasi Beragama

Mubyarto sebagai penggagas dari pada ekonomi pancasila itu sendiri tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian dan definisi tentang ekonomi Pancasila ini, butir butir ekonnomi yang secara asas di pelopori oleh mubyarto ini tidak juga dapat dikatakan sepenuhnya gagasan mubyarto seorang. Terlebih pada penyebutan frasa ekonomi pancasila. Bahwa mubyarto bukanlah orang pertama yang melontarkannya. Secara normatif wacana ini sudah dikemukakan oleh pendahulunya yaitu bung Hatta. Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Soekarno itu adalah seorang sarjana ekonomi yang telah menurunkan pemikiran perekonomiannya di Indonesia dengan menanggapi bahwa pentingnya azas kekeluargaan dalam melaksanakan sistem perekonomian di Bumi Indonesia dengan perwujudannya dengan Koperasi yang secara gotong royong, dan bersama-sama dalam meningkatkan dan melakukan pemerataan perekonomian Di Indonesia.

Swasono dengan jelas memberikan definisi mengenai ekonomi Pancasila dan landasan ekonomi pancasila ini bahwa Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafati dibidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanyapancasila di negeri ini. Jika pancasila adalah khas Indonesia, maka ekonomi pancasila adalah khas indonesia. Secara normatif, landasan dari pada ekonomi pancasila adalah apa yang terkandung dalam pembukaan, pasal 23,27 ayat (2), Pasal 33, dan 34 Undang-undang Dasar 1945. (Majid dan Swasono. 1981)

Washathiyah Al-Iqtishadiyah: Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Sebagai Sarana Mewujudkan Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama

Juga terdapat Perbedaan Pandangan Antara Emil Salim dengan Mubyarto dalam memandang ekonomi Pancasila secara mendasar. Menurut Tarli Nugroho Bahwa Mubyarto menggunakan ekonomi Pancasila Sebagai Kajian Teoritis Untuk Mengkritik teori ekonomi arus utama (mainstream Economis), dalam hal ini Neoklasik. Berbeda dengan Mubyarto, Emil Salim menerjemahkan Istilah Ekonomi Pancasila sebagai gagasan mengenai sistem perekonomian atau Politik Perekonomian. (Tarli Nugroho. 2016)

Perbedaan pemahaman mengenai Ekonomi Pancasila yang terjadi Emil dan Mubyarto secara mendasar terdapat pada pendekatan yang terjadi antar keduanya, yaitu secara konseptual dan pendekatan politik. Namun terlepas dari perdebatan antar keduanya, butir-butir materi yang terdapat pada ekonomi Pancasila ini sudah ada sejak pertengahan dasawarsa 1950-an. Menurut Mr. Wilopo dalam buku Ekonomi Pancasila mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri dari ekonomi Indonesia yaitu sistem ekonomi yang (1) *Tidak memungkinkan pemerasan manusia oleh manusia*, (2) *tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah* (3) *tidak menciptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan kekayaan*. (Dumairy, Tarli Nugroho. 2016)

Adapun Menurut Teguh, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, memberi tanggapan mengenai ekonomi Pancasila pada seminar “ekonomi Kerakyatan” tahun 2022 bahwa Ekonomi Pancasila Menjiwai makna yang terkandung pada Pancasila yaitu asas ketuhanan, yaitu bahwa Ekonomi Pancasila mengandung sifat ketuhanan yang tidak saja memandang ekonomi sebagai barang materialisme saja tapi juga mengandung sifat kehidupan setelah mati adalah juga peran dari ekonomi. Asas kemanusiaan, yaitu bahwa Ekonomi juga berlaku dalam memanusiakan manusia secara manusiawi dengan pergerakan ekonomi karena runtuhnya moral dapat terjadi karena runtuhnya modal. Olehnya kerja ekonomi adalah upaya dalam pemberdayaan manusia itu sendiri. asas persatuan yaitu bahwa Ekonomi Indonesia Seharusnya tidak menjadi pemisah satu antara yang lain, dan tidak menjadikan sekat antar sesama. Ekonomi seharusnya dapat mengintegrasikan antar sesama sebagai pemersatu sehingga tidak bercerai-berai. asas demokrasi, Gotong Royong juga musyawarah dalam ekonomi yang tidak saja melakukan peningkatan tapi juga upaya pemerataan dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dan asas keadilan, sebagai tujuan dari ekonomi itu sendiri.

Pada nilai-nilai yang terkandung dalam Ekonomi Pancasila, maka di dapatkan dijadikan dasar bahwa ekonomi tidak saja sebagai urusan duniawi saja, namun juga menjadikannya sebagai urusan akhirat dan menanamkan rasa kebersamaan dan persatuan secara adil dalam praktek-praktek perekonomian. Keseimbangan, persatuan, dan keadilan inilah yang menjadi nilai utama yang dapat diselaraskan pada urusan kemoderatan ditengah masyarakat sekitar dalam hal ekonomi.

Sedangkan Moderasi beragama yang selama ini dibicarakan adalah merupakan cara pandang sikap ataupun perilaku yang mengedepankan ke stabilan dan posisi yang di tengah sehingga nampak tidak berat pada golongan kanan atau yang biasa disebut dengan fundamentalisme dan juga tidak berat ke kiri atau yang juga biasa di sebut dengan liberalisme.

Secara harfiyah Wasathiyah adalah *Masdar shina'i* (مصدر صناعي) atau nomina dari kata washatha (وسط) yang dibentuk dengan tambahan ya' yang bertasydid serta ta' marbuta setelahnya yang selalu diterjemahkan dengan kata “moderasi”. Secara terminologi moderasi merupakan pola pikir pola bertindak dan berperilaku dengan ciri tawassuth, Tawazzun, dan ta'addul (afifuddin, 2018).

Moderat dalam pemikiran islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman baik beargam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin Kerjasama dengan asas kemanusiaan (Darlis, 2017) Sikap moderasi ini memiliki dasar dalam al-qur'an sebagaimana yang termaktub dalam surah albaqarah ayat 143 yang artinya “*Dan demikian kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat Pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan Kamu). Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. dan Allah tidak akan menyaniyakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”.*

Sedangkan kata ekonomi dalam Bahasa arab dengan kata *الاقتصاد* artinya sederhana bersal dari kata dari kata *قصد* yang artinya tetap lurus di jalan. (Ar-Raghib, 2017) Kata qashd dalam al-quran disebutkan dalam beberapa ayat antara lain:

- a. Kata Qashd dalam arti sederhana sebagaimana firman Allah Q.S. Lugman ayat 19: *واقصد في مشيك* (sederhanakanlah kamu dalam berjalan)

- b. Kata Qashd dalam arti pertengahan atau Moderat dalam Q.S. Fathir ayat 32: *فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد*
(lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri diantara mereka ada yang pertengahan)
Dalam Tafsir Al-mishbah Al-Qashd dalam arti moderasi dan ditengah berarti antara rasa takut dan harap ada juga yang memahaminya dalam arti peringkat pertengahan bukan yang durhaka, bukan juga yang taat beragama (Shihab, 2002)
- c. Kata Qashd dalam arti tidak begitu jauh dalam O.S. At-Taubah ayat 42: *وسفرا قاصدا*
(dan perjalanan yang tidak sebrapa jauh)

Dengan melihat kata dari Al-Iqtishad itu sendiri dapat dipastikan bahwa ternyata relasi antara kemoderatan dan ekonomi sangatlah kuat yaitu menjadikan keseimbangan dalam kehidupan dan juga menebar kemashlahatan. Mashlahat hanya bisa dicapai jika keseimbangan berlaku, antara dunia dan akhirat, antara hubungan dengan tuhan dan hubungan'sesama manusia, antara rohani dan jasmani, anatar fisik dan juga mental seseorang. Hal inilah yang menjadi titik temu antara ekonomi dan moderasi beragama yang secara bersama dan beriringan menginginkan terjadinya keseimbangan (eguilibirum) antar masyarakat sosial, interaksi duniawi dan kepentingan ukhrawi. (Azhari Akmal, 2017)

2.2. Sarana Mewujudkan Moderasi Beragama Melalui Ekonomi Pancasila.

Nilai-nilai ekonomi pancasila' sebagaimana yang telah dijelaskan diatas telah memberikan gambaran bagaimana ekonomi tidak saja bergerak pada porsi material saja, tapi juga mengedepankan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan endingnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Cita-cita dari ekonomi Pancasila dan moderasi beragama adalah selaras dan seirama, baik, dalam aspek kemanusiaan, dampai sampai pada tahap keadilannya. Sehingga hal yang perlu dilakukan sebagai sarana mewujudkan moderasi beragama berbasis ekonomi Pancasila Antara lain:

Pertama, Mencoba mewujudkan Nilai Nilai ekonomi Pancasila Pada praktek perekonomian di Indonesia dengan memberikan kesadaran baik pada tataran Produsen, Distributor, dan juga Konsumen bahwa ekonomi tidak hanya menyoal permasalahan material individu saja, tapi dalam membangun ekonomi.yang kuat dan berdaya, juga pemerataan dalam sektor perekonomian, juga dibutuhkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam poin-poin pancasila. Tidak akan terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang sangat, jika sistem perekonomian berbasis pada ekonomi pancasila yang yang berasaskan ekonomi kerakyatan dan gotong royong. Sehingga ditengah masyarakat tercipta kemandirian ekonomi dan keseimbangan antar masyarakat.

Kedua, ketidak independensian akal dapat dipengaruhi ketidak independensian ekonomi, olehnya dianggap perlu adanya kemandirian secara ekonomi sehingga dalam bertindak dan bertingkah laku tidak berada pada tuntutan ataupun dan juga tidak dipengaruhi apapun kecuali pada kebenaran. Sehingga mendorong nilai nilai kemoderatan seperti tawassuth, tawazzun dan tasamuh dapat terbangun dengan baik, karena aspek ekonomi yang dianggap vital dalam kehidupan telah dikerjakan sesuai nilai-nilai pancasila yang mengehendaki pada kemoderatan itu sendiri. Itulah yang menjadi alasan para ulama terdahulu tidak ingin terintervensi secara ekonomi pada siapapun kecuali melakukan kemandirian ekonomi, adalah untuk menjadikan segala cara berfikir dan bertindak berdasarkan pada kebenaran yang murni dan tidak tercampuri oleh kepentingan lain.

Olehnya menurut penulis sangatlah penting melakukan kemoderatan ekonomi melalui ekonomi pancasila, karena ekonomi dianggap aspek yang cukup fundamental dalam bersosial dan berinteraksi ditengah masyarakat. Seringkali didapatkan yang menjadi pemicu para ekstrimis adalah ketimpangan sosial yang amat sangat berjarak sehingga mereka menganggap perlu adanya sistem yang baru dengan melawan status quo sekalipun bertentangan pada nilai-nilai kedamaian dan ketentraman

5. Kesimpulan

Dengan begitu luasnya dimensi dan aktor yang terlibat dalam ekonomi dan perdagangan, maka menjadikannya sebagai isu yang sangat krusial dan senantiasa menempati agenda utama para pemimpin pemerintahan (Budi Winarno, 2014). Melihat ekonomi yang menjadi sarana fundamental dalam mengontrol tingkah sosial manusia menjadikannya sebagai sarana dalam mengendalikan tingkah laku manusia. Terlebih Indonesia dengan segala bentuk keanekaragamannya, beragam suku, bahasa, dan agama menjadi tantangan tersendiri dalam menghendaki kemoderatan ditengah kemajemukan.

Tiap-tiap negara mempunyai solusinya masing-masing yang dapat dijiwai untuk meningkatkan mutu pemberdayaan ekonomi dan peningkatannya. Salah satunya di Indonesia dengan gagasan Ekonomi Pancasila yang coba diganungkan oleh Mubyarto, meski awal munculnya banyak pertentangan yang terjadi namun kini pentingnya ekonomi yang menjiwai nilai-nilai pancasila dianggap sebagai salah satu sarana sebagai wujud kebersamaan dalam ekonomi, yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek materialnya saja, tapi juga menginternalisasi ekonomi dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan juga keadilan sebagai tujuan dari pada ekonomi itu sendiri

Moderasi beragama yang didasari pada sikap tawassuth, Tawazzun, dan ta'addul adalah hal yang dicita-citakan dalam praktek moderasi beragama, sehingga terciptanya suatu kedamaian dan kebersamaan, berdiri diantara banyaknya keragaman dapat dirasakan di Tanah Air Indonesia. Dengan integrasi nilai yang terkandung dalam ekonomi pancasila dan moderasi beragama ini, maka diharapkan melalui pembinaan ekonomi pancasila ini, mampu membuka ruang-ruang moderasi yang lebih besar secara fundamental, sehingga lahirnya kaum ekstrimis maupun liberalis dapat ditekan lebih melalui praktek-praktek ekonomi pancasila itu sendiri

Referensi :

- Akmal, Azhari, (2017), *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Telaah Atas Simpul-Simpul Ekonomi Dan Bisnis Dalam Al-Qur'an)*. Sumatra Utara : FEBI UIN-SU Press.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, (2017) *Almufradat fii gharibil qur'an*. Depok: Pustaka khazanah fawa'id.
- Darlis, (2017) mengungkap moderasi islam di tengah masyarakat multikultural. *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No.2 Desember, 225-255
- Dumary, Tarli Nugroho, (2016), *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Depok : Gadjah Mada University Press.
- Kuru, Ahmet T, (2022), *Islam Otoritarianisme, dan Ketertinggalan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Madjid dan Swasono, eds. (1981), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Muhajir, Afifuddin, (2018), *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*. Situbondo : Tanwirul Afkar.
- Shihab, M. Quraisy, (2002), *Tafsir Almisbah : Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Soekanto,soerjono (1986), pengantar penelitian hukum, jakarta: UI Pres.
- Winarno, Budi, (2014), *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Jakarta : PT. BUKU SERU.